

**ANALISIS PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DALAM KAMPANYE
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
BERDASARKAN PEMBERITAAN MEDIA CETAK**

Oleh: Dwi Agung dan Dr. Sunarso, M. Si./ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta

dwiagung666@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Program di bidang pendidikan yang ditawarkan dalam kampanye para calon Presiden periode 2014-2019 berdasarkan pemberitaan media massa, (2) relevansi program yang ditawarkan terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia, dan (3) keberpihakan media terhadap salah satu pasangan calon presiden dalam menyampaikan berita.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan *cross check* data antara dokumentasi dan wawancara. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu 2 ahli ilmu pendidikan Dr. Arif Rohman dan Dr. Dwi Siswoyo, serta 3 media cetak nasional antara lain Kompas, Media Indonesia, dan Republika. Analisis data menggunakan *critical discourse analysis* model Norman Fairclough.

Hasil penelitian menunjukkan (1) program bidang pendidikan Prabowo-Hatta antara lain peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan kualitas pendidikan, pendidikan 12 tahun gratis, mendorong *trio helix* dengan dana 10 triliun rupiah, alokasi dana 150 juta rupiah per sekolah, meningkatkan efisiensi belanja pendidikan, dan mendorong keberadaan pusat-pusat keunggulan. Jokowi-Kalla menjanjikan pembentukan karakter sejak dini, mewajibkan perusahaan asing di Indonesia untuk transfer teknologi, pendidikan 12 tahun gratis, pengintegrasian pendidikan karakter kedalam mata pelajaran, mendukung sertifikasi guru dan evaluasi ujian nasional. (2) Relevansi program penyamarataan alokasi anggaran untuk sekolah dengan masalah pendidikan dinilai kurang, seharusnya berangkat dari kebutuhan sekolah. Peningkatan kesejahteraan guru relevan diikuti evaluasi dan pemerataan distribusi sumber daya guru. Program peningkatan karakter dan program peningkatan teknologi relevan namun harus didasarkan pandangan bahwa teknologi bukan tujuan tapi sarana untuk mencapai tujuan. (3) Keberpihakan harian Kompas terlihat dalam beberapa edisi memuat berita pro pasangan Jokowi-Kalla dan lebih banyak mengiklankan pasangan tersebut. Harian Media Indonesia cenderung memuat berita-berita pro Jokowi-Kalla, berita-berita yang menyerang Prabowo-Hatta dan memuat iklan kampanye Jokowi-Kalla saja. Harian Republika lebih banyak memasang iklan kampanye Prabowo-Hatta, memilih tidak memberitakan pelanggaran kampanye Prabowo-Hatta, serta memproduksi berita yang dimaksudkan mengangkat elektabilitas pasangan tersebut.

Kata Kunci: *Program pendidikan, calon Presiden 2014, media cetak*

**THE ANALYSIS OF EDUCATION PROGRAM IN CAMPAIGN OF
PROSPECTIVE PRESIDENT AND DEPUTY PRESIDENT IN 2014
BASED ON PRINT MEDIA REPORTING**

By: Dwi Agung and Dr. Sunarso, M. Si./ Civic and Law Education,
Faculty of Social Science,
Yogyakarta State University
dwiagung666@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the research is to know : (1) education program offered by the prospective president in 2014-2019 period based on mass media reporting. (2) the relevance of the program offered against education problems in Indonesia, and (3) the partisanship of media toward one of the presiden candidate on delivering news.

This sort of research is descriptive with qualitative approach. Data collection technique with documentations and interviews. Validity checking technique use data cross check between documentations and interviews. The subjects of this research determined by purposive technique are the education science experts such as Dr. Arif Rohman dan Dr. Dwi Siswoyo, and 3 national print medias such as Kompas, Media Indonesia, and Republika. Data analysis use crtical discourse analysis by Norman Fairclough.

The result of this research shows that (1) Prabowo-Hatta education program such as the improvement of teachers welfare, equalize education quality, 12-year complimentary education, encourage trio helix with fund 10 trillion rupiah, fund allocation 150 million rupiah per school, improving the efficiency of education expenditure, and encourage the existing of centers of excellence. Jokowi-Kalla promising early character formation, requiring foreign companies in Indonesia to transfer technology, 12-year complimentary education, integrating character education into subjects, encourage teacher certification and national examination evaluation. (2) Relevance equalization program budget allocation for schools with education issues considered less, should be based on the needs of the school. Improving the teachers welfare is relevant, followed by evaluation and equalization distribution of teacher resources. The program to improve the character and technology are relevant to be applied, but should be based on paradigm that technology is not the goal but just a means to attain it. (3) Kompas alignments seen in several editions that they publish news pro Jokowi-Kalla and more advertise that couple. Media Indonesia tend to publish pro Jokowi-Kalla news, some news that charging Prabowo-Hatta, and produce Jokowi-Kalla's advertisement campaign only. Republika advertises more Prabowo-Hatta, do not include news about Prabowo-Hatta campaign violations, and producing the news that intended to improve their electability.

Keywords: *Educational program, candidates for President in 2014, the print media*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu proses kunci dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia sebagai bekal untuk menghadapi era global sebagai era persaingan. Tilaar (2009:2) mengidentifikasikan 4 (empat) ciri utama dari kehidupan dunia di era global, yaitu dunia tanpa batas (*borderless world*), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya di dalam kehidupan manusia, kesadaran terhadap hak dan kewajiban asasi manusia (*human rights and obligation*), serta kerjasama dan kompetisi antar bangsa (*mega competition society*). Berdasarkan 4 (empat) ciri tersebut, pendidikan nasional mampu menjadi dasar dalam mempersiapkan serta membangun individu-individu bangsa Indonesia yang kompeten dalam menghadapi setiap perubahan global.

Melaksanakan proses pendidikan nasional di Indonesia perlu adanya koordinasi oleh masing-masing pihak seperti legislatif sebagai pembuat kebijakan, serta lingkup yang lebih kecil seperti sekolah sebagai salah satu pelaksana proses pendidikan. Pihak pemerintah sebagai penguasa mempunyai hubungan subordinatif terhadap rakyat sebagai pihak dikuasai, yang dalam hal ini adalah hubungan di ranah pendidikan dimana masing-masing mempunyai arah dan tujuan yang sama.

Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang harus dicapai antara lain “...untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan hal tersebut tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nasional mencakup kecerdasan, kesehatan, ketaqwaan serta mengikuti perkembangan jaman.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut pemerintah memiliki kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, antara lain memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, menjamin atas ketersediaan dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, menyelenggarakan pendidikan nasional, dan menganggarkan 20% dari APBD dan APBN.

Permasalahan pendidikan di Indonesia semakin kompleks seiring perkembangan jaman dengan tidak diimbangi pemecahan masalah yang dikatakan cukup. Berdasarkan data BPS tahun 2013, rata-rata nasional angka putus sekolah usia 7–12 tahun mencapai 0,67% atau 182.773 anak; usia 13–15 tahun sebanyak 2,21%, atau 209.976 anak; dan usia 16–18 tahun semakin tinggi hingga 3,14% atau 223.676 anak. Provinsi terbanyak siswa putus sekolah usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun adalah Jawa Barat hingga masing-masing 32.423 anak dan 47.198 anak. Pada usia 16–18 tahun, distribusi putus sekolah terbanyak di Provinsi Jawa Timur mencapai 35.546 anak (Anonim, 2013: <http://lipsus.kompas.com/>)

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum terlaksana. Di daerah yang notabene berada dalam satu pulau dengan pusat pemerintahan, tidak semua anak bisa menikmati belajar di sekolah. Keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendidikan nasional dibanding hal-hal kontradiktif seperti memperkaya diri sendiri dan golongannya serta kunjungan ke luar negeri yang kurang penting masih harus dipertanyakan.

UNESCO melalui *Education For All Global Monitoring Report 2012* menyatakan Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 127 negara. Dalam situs resminya, UNESCO menyebutkan data ini didasarkan atas angka pendidikan dasar universal (*universal primary*

education), melek huruf untuk orang dewasa (*adult literacy*), keseimbangan dan kesetaraan gender (*gender parity and equality*), serta kualitas pendidikan (*quality of education*) dari negara-negara yang menjadi sampel penelitian (UNESCO, 2012: <http://www.unesco.org/>).

Mutu pendidikan nasional berangkat dari hal terkecil yaitu tingkat keberhasilan belajar peserta didik di kelas. Udiutomo (2013:111) menyebutkan ada 2 (dua) faktor yang akan menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa, yakni faktor internal atau keadaan dan kondisi siswa yang mencakup jasmani dan rohani serta faktor eksternal yang mencakup kondisi lingkungan di sekitar siswa baik lingkungan sosial maupun non-sosial. Lingkungan belajar dapat diartikan sebagai laboratorium atau tempat bagi anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar. Baik lingkungan sosial ataupun non-sosial, keduanya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan siswa.

Berbagai aspek yang perlu disediakan tersebut belum mampu dikatakan optimal dan jauh dari harapan. Dari sisi sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan kemendikbud melaporkan melalui kemendiknas.go.id, sampai tahun 2011 ruang kelas SD yang rusak berjumlah 187.855 ruang dari total 895.761 ruang kelas. Di SMP, ada 39.554 ruang rusak dari 192.029 ruang kelas (Latief, 2011: <http://edukasi.kompas.com/>)

Hingga tahun 2012, jumlah ruang kelas SD secara nasional memiliki 899.016 ruang kelas, baik sekolah negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut kondisi ruang kelas SD yang masih tergolong baik jumlahnya sebanyak 605.918, dan yang tergolong rusak sebanyak 293.098. Di tingkat SMP, secara nasional jumlahnya sebanyak 31.183 sekolah dengan jumlah ruang belajar SMP secara nasional saat ini terdapat 298.268 ruang kelas. Dari jumlah tersebut kondisi ruang kelas SMP yang masih tergolong baik jumlahnya sebanyak 172.948, sedangkan ruang belajar rusak mencapai 152.320 (Anonim, 2012: <http://www.rmol.co>).

Terdapat peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 baik di jenjang SD maupun SMP dalam hal jumlah ruang kelas namun jumlah ruang kelas yang rusak juga mengalami kenaikan jumlah yang signifikan. Pada tahun 2011, perbandingan ruang kelas yang rusak terhadap jumlah seluruh ruang kelas mencapai 20,9 % untuk SD dan 20,5 % untuk SMP. Sedangkan pada tahun berikutnya, menyentuh angka 32,6 % untuk SD dan 42 % untuk jenjang SMP. Kenaikan presentasi jumlah ruang kelas yang rusak ini bisa saja terjadi karena hal-hal yang terjadi di luar kehendak seperti bencana alam atau kerusuhan. Namun jumlah kenaikan yang terlalu besar mengindikasikan bahwa keseriusan pemerintah untuk membangun kembali ruang-ruang kelas tersebut belum terlihat, sehingga pembangunan ruang kelas baru tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang menjadi rusak. Ruang kelas menjadi tempat dominan bagi peserta didik berinteraksi dengan pendidik dalam proses transfer ilmu pengetahuan, maka dari itu, kenyamanan, keamanan, dan adanya fasilitas yang memadai menjadi satu hal yang mutlak dimiliki.

Perlu digarisbawahi kewajiban pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara dalam rentang umur sesuai yang tercantum dalam UU Sisdiknas berarti memerlukan komitmen dari pemerintah secara berkesinambungan, tidak hanya konsisten pada satu masa pemerintahan saja namun pada saat dan setelah masa transisi baik perubahan presiden, kabinet kementerian, maupun anggota legislatif pun harus ada komitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pendidikan secara nasional tidak mungkin dilepaskan dari campur tangan kekuasaan yang erat hubungannya dengan kegiatan-kegiatan politik. Abernethy dan Coombe (1965) dalam Sirozi (2010:7) mengungkapkan keterkaitan tersebut dengan kalimat *'education and politics are inextricably linked'*. Dalam masyarakat modern pada umumnya,

pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas, dan praktik sehari-harinya. Pendidikan juga merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah yang besar di dalam masyarakat modern. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut mempengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik dari waktu ke waktu,. Keputusan-keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik (Sirozi, 2010:19)

Presiden yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan (2) mempunyai hak mengajukan RUU kepada DPR serta menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang, memegang peranan penting dalam pembentukan berbagai kebijakan terkait pendidikan nasional. Bertolak dari permasalahan mengenai pendidikan tersebut diatas, calon-calon presiden yang bersaing pada pemilu presiden 2014 mencanangkan program-program yang dianggapnya relevan serta bisa menjadi solusi untuk dilaksanakan saat mengemban tugas sebagai presiden. Bahasan mengenai pendidikan, baik terkait dengan gagasan-gagasan yang dianggap mampu dijadikan solusi maupun kritik terhadap pemerintah periode sebelumnya dapat dijadikan materi kampanye yang layak jual sekaligus mempunyai tempat tersendiri sebagai bahan pertimbangan bagi calon pemilih, sejauh mana pemikiran masing-masing calon presiden dalam menyikapi isu pendidikan, disamping ketertarikan pemilih

berdasarkan janji-janji mengenai kesejahteraan rakyat secara ekonomi dan personalitas masing-masing calon.

Pergantian kepemimpinan berarti ada masalah yang harus diterima pemerintahan selanjutnya, begitu pula problematika ranah pendidikan yang tidak serta merta dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Salah satu hal yang mendasar dan paling disoroti dari pendidikan adalah mengenai politik anggaran. Bertolak dari kebijakan-kebijakan yang dicanangkan pemerintah periode sebelumnya, yang dalam hal ini dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 (dua) periode yang mencanangkan alokasi dana pendidikan sesuai yang ada dalam UUD 1945 sebesar 20% APBN. Namun sayangnya dalam kedua periode kepemimpinan tersebut masih ada pemanfaatan celah kebijakan oleh pemerintah untuk membungkus besaran 20% ini atas nama pendidikan, seperti yang dikutip dari situs resmi ITB berikut ini.

Dari 248,9 triliun rupiah anggaran pendidikan 2011, hanya sebesar 89,7 triliun rupiah yang dikelola oleh pemerintah pusat, sementara 158,2 triliun rupiah sisanya dikelola oleh daerah. Dari 89,7 triliun rupiah yang dikelola oleh pemerintah pusat, 55,5 triliun rupiah dikelola oleh Kemendiknas, 27,2 triliun rupiah oleh Kementerian Agama, dan 6,8 triliun rupiah sisanya dibagikan ke 13 kementerian dan 4 lembaga lain. Sedangkan dari 158,2 triliun rupiah yang dikelola oleh daerah, sebanyak 104 triliun rupiah dialokasikan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang mayoritas dimanfaatkan untuk gaji guru, 10 triliun rupiah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), 18,5 triliun rupiah untuk tunjangan profesi guru, 16,8 triliun rupiah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan lainnya sebesar 8,3 triliun rupiah. Politik anggaran pemerintah pusat sangat kontraproduktif dengan semangat pemanfaatan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar 9 tahun gratis. Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat rutin dan tidak efektif untuk meningkatkan semangat pendidikan dasar gratis dan aksesibilitas yang baik (Dhani, 2011: <http://km.itb.ac.id>).

Dalam upayanya menjaring atensi, simpati, sekaligus aspirasi publik terkait program-program yang diusung, aktor-aktor politik, dalam hal ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya memerlukan sebuah komunikasi politik. Bennett dan Entman (2001) menyebutkan bahwa komunikasi politik dewasa ini dilakukan secara

termediasi lewat media massa atau lazim disebut *mediated politics*. Selanjutnya media juga tidak lagi menjadi sarana komunikasi semata, tetapi sekaligus sebagai ruang publik untuk deliberasi politik dimana warga negara dapat berpartisipasi secara aktif, berkat kemajuan teknologi dan makin independennya ekonomi media, sehingga terbebas dari intervensi negara. Norris (2003) menyebutkan bahwa dalam prakteknya media melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Pengalaman membuktikan relasi media dan politik bersifat interpretatif dan saling mempengaruhi. Artinya, relasi tersebut tidak selalu bersifat kooperatif, tetapi juga dapat bertentangan atau berbeda pandangan. Namun yang paling penting dalam hubungan tersebut adalah posisi media, yang melihat politik di satu sisi sebagai sumber berita, sementara di sisi lain sebagai proses yang harus dikritiknya (Simarmata, 2014:5).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Program Bidang Pendidikan dalam Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 berdasarkan Pemberitaan Media Cetak”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian yang dipilih adalah terbitan media cetak berskala nasional pada masa kampanye yakni 4 Juni sampai dengan 5 Juli 2014 yaitu Harian Kompas, Media Indonesia, dan Republika. Subjek penelitian selajutnya dipilih dari ahli yang pernah menempuh studi mengenai ilmu pendidikan yakni Dr. Arif Rohman, M. Si dan Dr. Dwi Siswoyo, M. Hum.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Desember tahun 2015. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *cross check* data, selanjutnya dianalisis menggunakan *Critical Discourse Analysis* (analisis wacana kritis) model Norman Fairclough dengan tahapan deskripsi (*Text Analysis*), interpretasi (*Processing Analysis*), dan eksplanasi (*Social Analysis*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Program Pendidikan Capres dan Cawapres Periode 2014-2019 Berdasarkan Pemberitaan Media Massa

Program bidang Pendidikan pasangan Prabowo-Hatta antara lain peningkatan kesejahteraan guru, wajib pendidikan 12 tahun gratis yang berkualitas dan seluas mungkin bagi rakyat. Mewajibkan perusahaan asing di Indonesia untuk transfer teknologi, menjalankan riset bersama antara industri, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dengan dana 10 triliun rupiah, pengalokasian dana 150 juta rupiah per sekolah. Program selanjutnya adalah mengembangkan pendidikan untuk daerah sulit dijangkau dan miskin, penghapusan pajak buku, meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru dan dosen, menekankan pentingnya keberadaan pusat-pusat keunggulan di daerah, serta meningkatkan efisiensi pos-pos belanja pendidikan dalam APBN.

Pasangan Jokowi-Kalla menjanjikan peningkatan kualitas kurikulum pendidikan di semua tingkatan untuk membentuk karakter sejak dini, mewajibkan perusahaan asing di Indonesia untuk melakukan transfer teknologi dan mendorong sektor swasta bekerjasama dengan pusat riset dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian-penelitian. Program selanjutnya adalah program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun gratis, mendukung sertifikasi guru, evaluasi pelaksanaan UN baik dari sistem, isi, maupun pelaksanaannya, serta menonjolkan pendidikan budi pekerti dan karakter dalam setiap proses pendidikan dan pengembangan teknologi.

2. Relevansi Program Pendidikan yang Ditawarkan terhadap Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Relevansi program-program pendidikan yang melibatkan anggaran seperti milik Pasangan Prabowo-Hatta yang ditujukan untuk sekolah dinilai kurang, seharusnya berangkat dari kebutuhan sekolah dengan jalan mengajukan daftar kebutuhan dan adanya tim yang menganalisis kebutuhan-kebutuhan tersebut karena tiap sekolah mempunyai kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Menganggarkan dan menyamaratakan nominal tertentu bisa menyebabkan kebingungan di sekolah, berpotensi korupsi dalam pelaksanaannya, serta bisa menjadi beban jika menganggarkan dana sedemikian besar untuk didistribusikan ke semua jenjang pendidikan.

Peningkatan kesejahteraan guru yang dicanangkan kedua pasangan calon merupakan hal yang relevan dan bisa diaplikasikan di Indonesia diikuti kebijakan untuk mengevaluasi guru di lapangan dan harus dilanjutkan dengan peningkatan distribusi sumber daya guru. Untuk sekolah tidak hanya kurikulum yang terus diubah, tapi harus diimbangi sarana prasarana untuk melaksanakan kurikulum termasuk guru yang merata hingga daerah terpencil.

Program pendidikan Pasangan Jokowi-Kalla yang berbasis Revolusi mental relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pendidikan Indonesia yang berusaha membentuk anak-anak cerdas perlu diimbangi dengan kepribadian dan karakter. Program peningkatan teknologi seharusnya didasarkan pada pandangan bahwa teknologi merupakan alat untuk mencapai tujuan tidak semata-mata dijadikan sebagai tujuan.

3. Keberpihakan Media terhadap Salah Satu Pasangan Calon Presiden dalam Menyampaikan Berita.

Kompas cenderung menitikberatkan berita dan peningkatan elektabilitas pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan memuat lebih banyak iklan kampanye pasangan

tersebut yaitu 19 berbanding 1 milik pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa serta dalam beberapa edisi memuat berita yang dimaksudkan menggiring simpati publik ke pasangan Jokowi-Kalla. Namun di lain pihak, Kompas cenderung berhati-hati menggunakan bahasa dan diksi dalam membuat sebagian besar judul-judul berita.

Media Indonesia terlihat berusaha keras mengangkat elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla di setiap edisinya dengan memuat 18 buah iklan kampanye pasangan Jokowi-Kalla tanpa satupun iklan kampanye dari Prabowo-Hatta. Berita-berita yang dihasilkan Media Indonesia cenderung menggunakan judul yang pro pasangan Jokowi-Kalla, serta di waktu yang sama sekaligus mengangkat berita-berita dengan judul yang menyerang pasangan Prabowo-Hatta.

Republika terkesan condong ke arah pasangan Prabowo-Hatta melalui iklan dan berita yang ditulis. Jumlah iklan kampanye yang dimuat dalam harian Republika adalah 12 buah dengan 7 iklan kampanye dari pasangan nomor urut 1 dan 5 lainnya dari pasangan nomor urut 2. Republika terkesan berhati-hati dalam memilih susunan kata sebagai judul dan berita, namun dalam beberapa edisi terdapat kecenderungan memilih untuk tidak mencantumkan berita negatif mengenai pasangan Prabowo-Hatta dan memproduksi berita yang berusaha meningkatkan elektabilitas pasangan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis program bidang pendidikan dalam kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berdasarkan pemberitaan media cetak, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Capres dan Cawapres Periode 2014-2019 Berdasarkan Pemberitaan Media Massa

Program bidang Pendidikan pasangan Prabowo-Hatta antara lain peningkatan kesejahteraan guru, wajib pendidikan 12 tahun gratis, mewajibkan perusahaan

asing di Indonesia untuk transfer teknologi, menjalankan *trio helix* dengan dana 10 triliun rupiah, serta pengalokasian dana 150 juta rupiah per sekolah. Program selanjutnya adalah mengembangkan pendidikan untuk daerah sulit dijangkau dan miskin, penghapusan pajak buku, menekankan pentingnya *center of excellence*, serta meningkatkan efisiensi pos-pos belanja pendidikan dalam APBN.

Pasangan Jokowi-Kalla menjanjikan peningkatan kualitas kurikulum pendidikan, membentuk karakter sejak dini, mewajibkan perusahaan asing di Indonesia untuk melakukan transfer teknologi dan mendorong sektor swasta bekerjasama dengan pusat riset dan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian-penelitian. Program selanjutnya adalah program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun gratis, mendukung sertifikasi guru, evaluasi pelaksanaan UN baik, serta menonjolkan pendidikan budi pekerti dan karakter dalam setiap proses pendidikan dan pengembangan teknologi.

2. Relevansi Program Pendidikan yang Ditawarkan terhadap Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Relevansi program-program pendidikan yang melibatkan anggaran seperti milik Pasangan Prabowo-Hatta yang ditujukan untuk sekolah dinilai kurang, seharusnya berangkat dari kebutuhan sekolah.

Peningkatan kesejahteraan guru yang dicanangkan kedua pasangan calon merupakan hal yang relevan dan bisa diaplikasikan di Indonesia diikuti kebijakan untuk mengevaluasi guru di lapangan dan harus dilanjutkan dengan peningkatan distribusi sumber daya guru. Program pendidikan Pasangan nomor urut 2 yang berbasiskan Revolusi mental relevan untuk diterapkan di Indonesia untuk membangun kepribadian dan karakter. Program peningkatan teknologi seharusnya

didasarkan pada pandangan bahwa teknologi merupakan alat untuk mencapai tujuan bukan dijadikan sebagai tujuan.

3. Keberpihakan Media terhadap Salah Satu Pasangan Calon Presiden dalam Menyampaikan Berita.

Kompas cenderung berusaha mengangkat elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla dalam beberapa edisi melalui iklan dan berita. Media Indonesia cenderung pro pasangan Jokowi-Kalla sekaligus mengangkat berita-berita dengan judul yang menyerang pasangan Prabowo-Hatta. Republika dalam beberapa edisinya mencoba memproduksi berita yang berusaha meningkatkan elektabilitas pasangan Prabowo-Kalla dengan memilih untuk tidak mencantumkan berita negatif mengenai pasangan tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis program pendidikan dalam kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berdasarkan pemberitaan media cetak, maka penulis mengemukakan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Media cetak hendaknya lebih mengutamakan pemberitaan yang berimbang khususnya dalam bidang politik tanpa terjebak dalam ikatan-ikatan dan/atau kepentingan politik golongan tertentu.
2. Media cetak sebaiknya memperbanyak konten berita khususnya di bidang Politik yang memuat nilai-nilai pendidikan politik guna menopang kehidupan demokrasi Indonesia yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Simarmata, Salvatore. 2014. *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sirozi, M. 2010. *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tilaar, H. A. R. 2009. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Udiutomo, Purwo, dkk. 2013. *Besar Janji daripada Bukti; Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi*. Bogor: Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Anonim. 2013. *Si Miskin Tidak Dilarang Sekolah*. diakses dari <http://lipsus.kompas.com/kemdikbud/read/2013/10/16/1236445/Si.Miskin.Tidak.Dilarang.Sekolah> pada tanggal 14 Mei 2014

Anonim. 2012. 110 Ribu Ruang Kelas SD Kondisinya Rusak Berat. diakses dari <http://www.rmol.co/read/2012/02/12/54577/110-Ribu-Ruang-Kelas-SD-Kondisinya-Rusak-Berat-> pada tanggal 14 Mei 2014

Dhani. 2011. *Evaluasi 2 Tahun SBY-Boediono: Menggugat Efektivitas Program Aksi Bidang Pendidikan*. diakses dari <http://km.itb.ac.id/site/evaluasi-2-tahun-sby-%E2%80%93-boediono-menggugat-efektivitas-program-aksi-bidang-pendidikan/> pada tanggal 14 Oktober 2014

Latief. 2011. *Soal Sekolah Rusak. Kita Keterlaluhan....* diakses dari <http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/30/1123095/Soal.Sekolah.Rusak.Kita.Keterlaluhan....> pada tanggal 13 Mei 2014

UNESCO. 2012. diakses dari <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2010/gmr2010-annex-01-edi.pdf> pada tanggal 2 Desember 2014